

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ciamis kian hari makin bertambah, hal tersebut dapat dibuktikan dari konfirmasi kasus COVID-19 mencapai 9693 kasus hingga tanggal 21 Juli 2021. Tingginya penyebaran wabah tersebut merupakan salah satu dari latar belakang pelaksanaan PSBB di Kabupaten Ciamis. Pemberlakuan PSBB di Kabupaten Ciamis dimulai sejak tanggal 30 Mei hingga 12 Juni 2020. Pelaksanaan PSBB pada Bulan Mei dilaksanakan beberapa tahap yakni pada awal bulan dan juga akhir bulan. Pada awal bulan Mei, Pemerintah Kabupaten Ciamis menyerukan pelaksanaan PSBB diseluruh kecamatan yakni 27 kecamatan, sedangkan pada akhir Bulan Mei, Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan PSBB secara parsial pada tujuh Kecamatan yakni Kecamatan Kota, Banjarsari, Pamarican, Panawangan, Panumbangan, Rancah, dan Kawali. Pelaksanaan PSBB secara parsial ini dikarenakan Kabupaten Ciamis berada pada zona kuning yang berlevel 3 sehingga diperlukan PSBB agar kondisi lebih kondusif hingga bulan Juni (Purnama, 2020).

Adapun alasan lain Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan PSBB ialah agar pemerintah lebih fokus terhadap situasi pemudik yang datang ke Kabupaten Ciamis serta lebih fokus memperhatikan kondisi masyarakat setempat melalui perketatan wilayah yang dilaksanakan oleh tim gugus COVID-19 Ciamis sebab terdapat 36.000 pemudik yang telah tersebar di Kabupaten Ciamis. Menurut Bupati Ciamis dalam pelaksanaan rapat virtual bersama seluruh camat di Kabupaten Ciamis turut menjelaskan bahwa pelaksanaan PSBB dapat digunakan masyarakat untuk melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing (Aghna, 2020).

Layaknya daerah lain, pelaksanaan pun juga memiliki sistem yang hampir serupa sebab mekanisme PSBB telah diatur oleh Kemenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang dilaksanakan selama 14 hari tergantung dengan kondisi penularan wabah di daerah tersebut (Dewi, 2020). Meskipun berlangsung tidak lama akan tetapi adanya pandemi dan pemberlakuan PPKM juga menimbulkan polemik, salah satunya ialah pada sektor perekonomian yang menurun akibat adanya pembatasan kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan lesuhnya pendapatan masyarakat Kabupaten Ciamis. Dilansir dari laman resmi *Jabarprov.go.id* berjudul “*PPKM Darurat Jawa-Bali, Ini Penjelasan Bupati Ciamis*” bahwa Kabupaten Ciamis menempati level 3 atau berstatus zona oranye.

Landasan hukum yang memuat tentang pelaksanaan PSBB di Kabupaten Ciamis terdapat pada Instruksi Bupati Ciamis Nomor 441/6-HUK/2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Kabupaten Ciamis guna menekan angka penyebaran COVID-19 dengan melakukan pembatasan jam operasional transportasi umum, penutupan gerai makanan serta tempat umum, dan pelayanan publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya pelaksanaan kegiatan sehari-hari diijinkan untuk tetap terlaksana dengan menggunakan protokol kesehatan dan ketentuan lain yang berlaku seperti halnya menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, tidak berkerumunan, dan lain-lain.

Namun, tidak dapat di pungkiri pula jika pelaksanaan PPKM berdampak pula pada sektor perekonomian di Kabupaten Ciamis sebab adanya pembatasan jam operasional tempat perbelanjaan, tempat makan, dan tempat hiburan yang ditutup lebih awal dari biasanya. Dengan begitu, secara otomatis pihak pelaksana ekonomi khususnya masyarakat kehilangan sebagian pemasukan sebab harus tutup lebih awal, khususnya di malam hari (Bidang SKDI Kabupaten Ciamis, 2020).

Penerapan PPKM di Kabupaten Ciamis memberikan dampak yang dianggap cukup mengganggu perekonomian masyarakat, seperti halnya pemutusan hubungan kerja dan perumahan sementara bagi beberapa tenaga kerja, sekitar 15 perusahaan perusahaan di bidang makanan ringan, rumah makan, UMKM, dan pabrik kayu telah merumahkan 694 tenaga kerja, dan merosotnya pendapatan bagi tukang ojek online di Kabupaten Ciamis (Nurhandoko, 2020). Selain adanya tenaga kerja yang dirumahkan, perekonomian pada sektor pariwisata dan transportasi di Kabupaten Ciamis juga cukup merosot sebab pada terdapat beberapa pembatasan pengunjung bahkan penutupan lokasi wisata sebab adanya strelisisasi di masa Pandemi COVID-19, sehingga pemasukan untuk daerah dan masyarakat pun otomatis berkurang (Fauzan, 2020).

Seperti halnya pada PO Bus Pariwisata Gapuraning Rahayu yang harus mengurangi jumlah operasional bus sekitar 50 persen dari 130 bus yang ada sebab adanya penutupan tempat pariwisata di Kabupaten Ciamis. Meskipun tetap beroperasi, akan tetapi pemasukan yang diterima tetap saja tidak menutupi biaya operasional yang harus dialokasi kan terhadap pegawai dan dana perawatan alokasi bus, hal inilah yang masih menjadi permasalahan ekonomi bagi pemilik usaha dibidang transportasi (Nurhandoko, 2020). Hadirnya masalah perekonomian merupakan suatu tanda dibutuhkannya kebijakan pemerintah sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan publik. Kebijakan dan upaya yang dilaksanakna pemerintah merupakan bentuk dari partisipasi pemerintah yang berdaya tanggap serta dapat dijadikan sebagai bahan penilaian kemampuan pejabat publik dalam mengatasi permasalahan serta kebutuhan masyarakat (Yuningsih, 2018).

Bentuk dari upaya pemerintah Kabupaten Ciamis dapat berupa pengadaan kebijakan publik yang nantinya dapat menghasilkan program-program dalam pemulihan ekonomi dimasa Pandemi COVID-19. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Ciamis melaksanakan berbagai program pembangkitan ekonomi yang bertujuan untuk membenahi perkonomian masyarakat dari

keterpurukan perekonomian. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pemulihan ekonomi masyarakat melalui usaha rakyat menimbulkan pembentukan program-program bagi masyarakat untuk turut serta berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi di Kabupaten Ciamis. Adapun beberapa program tersebut ialah di bidang pertanian, peternakan, dan pangan lainnya (Berrie, 2020).

Pada rapat paripurna yang dilaksanakan oleh Bupati Ciamis terdapat rancangan KUA PPAS yang berdasarkan dengan RKPD Kabupaten Ciamis untuk tetap fokus memperbaiki dan membenahi pemulihan ekonomi dengan memprioritaskan sektor pertanian, UMKM, industry, pariwisata dan investasi (Prayudi, 2020). Dalam pemenuhan pangan, Pemerintah Kabupaten Ciamis memprioritaskan peran petani di berbagai wilayah Kabupaten Ciamis untuk memberdayakan kemampuan untuk merealisasikan kebutuhan yang dilaksanakan secara mandiri sebagai jalan untuk menuju pembangkitan ekonomi bersama dengan kelompok tani Sumber Ladang Andalan yang telah mengerahkan berbagai tumbuhan pangan seperti kelapa serta buah-buahan lainnya seperti durian, mangga, dan kelengkeng di lahan seluas 24 hektar. Pelaksanaan ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Ciamis ialah bertani, maka dari itu pemerintah mencoba untuk memberdayakan kemampuan yang di miliki masyarakat pada masa darurat seperti ini (Yusnita, 2020).

Program lain yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis berada pada sektor peternakan yang bekerja sama untuk melakukan produksi serta distribusi hasil unggas ayam kepada Kota Bogor. Kerjasama antar daerah ini bertujuan agar menyejahterakan peternak di Kabupaten Ciamis untuk tetap melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan di tengah Pandemi COVID-19 ini (Berrie, 2020). Menurut Staf SKDI Pemkab. Ciamis, pada pemulihan ekonomi masyarakat, Bupati Ciamis menganggarkan keperluan dan ekonomi masyarakat sebesar

Rp. 500.000.000 untuk 19 kecamatan dan 45 desa di Kabupaten Ciamis yang terkena dampak COVID-19 yang diperuntukkan untuk bantuan materi bagi masyarakat yang berdampak dengan COVID-19, baik secara rumah tangga atau bahkan bantuan untuk usaha kecil di desa-desa yang tersebar di Kabupaten Ciamis.

Pada pelaku usaha mikro di Kabupaten Ciamis menerima bantuan sosial senilai Rp. 2.400.000 per UMKM, hal ini dilakukan agar UMKM memiliki tambahan modal dan dapat memutar modal tersebut untuk usahanya. Sedangkan bantuan bagi rumah tangga diberikan beberapatahap yakni tahap 1 sejumlah Rp. 150.000, tahap 2 yakni nominal uang tunai sejumlah Rp.150.000, dan di tahap 3 yakni Rp.100.000. Jumlah bantuan tersebut belum termasuk dengan bantuan sembako dengan nominal Rp. 350.000 perbulan di tahap 1 dan 2, sedangkan pada tahap 3 terjadi penurunan nominal bansos sembako yakni menjadi Rp. 250.000. Kebijakan yang diberikan pemerintah bukan semata-mata hanya sebagai peraturan yang tertulis, akan tetapi dapat digunakan sebagai pengendali dan pelaksana program yang dapat tercipta dari suatu kebijakan dengan memanfaatkan kemampuan dan inovasi yang dimiliki.

Jika dilihat dari kebijakan yang dibentuk, hal itu merupakan suatu langkah yang diambil sebagai alternatif pemerintah terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan tersebut (Kambey, 2017). Dari adanya teori tersebut apabila diselaraskan dengan masa Pandemi COVID-19 saat ini di Kabupaten Ciamis, maka diperlukan pembenahan atau peningkatan pada pemanfaatan alternatif dengan memanfaatkan sumber daya atau potensi wilayah agar tercapai pemulihan ekonomi. Adapun upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dimasa Pandemi COVID-19 ini dengan mengembangkan dan

meningkatkan sektor pertanian mengingat wilayah ini memiliki potensi pertanian yang dapat dijadikan sebagai roda perekonomian.

Pemulihan ekonomi tersebut dapat dilihat dari terbentuknya kebijakan yang diimplementasikan dengan upaya atau program pada sektor tani sehingga memberikan pengaruh yang mampu meningkatkan kondisi daerah meskipun dimasa krusial seperti saat ini. Meskipun permasalahan ekonomi di Kabupaten Ciamis terdiri dari berbagai hal, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hendak fokus mengulas tentang pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi pada masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Ciamis melalui sektor pertanian sebab sektor tersebut cukup menjanjikan dalam pembangkitan perekonomian daerah dan masyarakat sebab mayoritas masyarakat berkecimpung dibidang pertanian serta kondisi wilayah yang berpotensi dalam produksi hasil tani. Dari adanya terkait hasil produksi dari sektor pertanian di Kabupaten Ciamis, maka sektor tersebut memberikan pengaruh terhadap kontribusi lapangan usaha yang memiliki persentasi tertinggi jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya, pasalnya sektor pertanian memiliki peningkatan meskipun dimasa Pandemi COVID-19 yang dapat dibuktikan dari hasil kontribusi distribusi ekonomi menurut laporan Badan Pusat Statistika Kabupaten Ciamis yang menjelaskan jika kontribusi pertanian dimasa Pandemi COVID-19 terhadap perekonomian telah menyumbang sekitar 23,60%, hal ini cukup meningkat sekitar 0,10 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 2019 sekitar 23,50% (Laporan BPS KABUPATEN Ciamis, 2020).

Pengaruh yang timbul dari adanya pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan sektor pertanian ialah tersedianya produksi pangan di Kabupaten Ciamis sehingga tidak diperlukan pembelian produk tani dari wilayah lain, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat dimasa Pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan sumber daya manusia khususnya kelompok tani

melalui program padat karya tani yakni pelaksanaan proyek pembenahan infrastruktur pertanian beberapa desa dan kecamatan pada Kabupaten Ciamis (Nurdiana, 2020).

Dari penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti serta menganalisa dan memaparkan tentang pengaruh kebijakan dibidang pertanian pada pemulihan ekonomi yang tertuang dalam penelitian berjudul **KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DALAM PEMULIHAN EKONOMI (STUDI KASUS : PENGARUH KEBIJAKAN PADA SEKTOR PERTANIAN DALAM PEMULIHAN EKONOMI KABUPATEN CIAMIS DIMASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021)**. Alasan peneliti memilih Kabupaten Ciamis sebagai lokasi penelitian karena Pemerintah Kabupaten Ciamis turut mengarahkan masyarakat sekitar melalui kebijakan serta membentuk program untuk pembantu pemulihan perekonomian dengan mengembangkan perekonomian mikro dimasa Pandemi COVID-19 melalui inovasi dibidang pertanian dalam memnuhi kebutuhan hidup masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang penelitian ini, maka peneliti menemukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pemulihan perekonomian pada bidang pertanian masyarakat dimasa Pandemi COVID-19 ini ?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi bagi masyarakat petani di Kabupaten Ciamis dimasa Pandemi COVID-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari adanya latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti pada penelitian ini, maka ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1.1.1 Untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam pemulihan perekonomian pada bidang pertanian masyarakat di masa Pandemi COVID-19.
- 1.1.2 Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis dimasa Pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memulihkan perekonomian masyarakat serta mengembangkan pengetahuan dan keilmuan yang di dapatkan dari materi perkuliahan khususnya mengenai peran pemerintah sebagai pelayan publik. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan kedepan bagi pembaca tentang partisipasi yang telah di laksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam menangani penurunan tingkat perekonomian pada kondisi darurat seperti Pandemi COVID-19 ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang di dapatkan dari penelitian ini ialah adanya pandangan bagi Pemerintah Kabupaten lain untuk melakukan kegiatan yang serupa guna pemulihan perekonomian masyarakat dengan pengembangan SDA di wilayahnya juga memberikan bukti yang konkret mengenai keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengadakan program pemulihan ekonomi.

1.5 Kajian Pustaka

Judul Penelitian	Peneliti	Isi Penelitian
<p>Respon Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Peraturan Bupati Wajib Madrasah Diniyah. Jurnal Autentik, Vol.4, No.1</p>	<p>(Kuswandi, 2020)</p>	<p>Pada penelitian ini, peneliti menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu menganalisa realita yang ada di dalam kehidupan masyarakat agar di sesuaikan dengan keputusan dan solusi yang di bentuk sehingga dapat mencakup segala aspek kebutuhan masyarakat.</p>
<p>Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I, Vol. 7, No.6.</p>	<p>(Junianingsih , Consuello , & Tarmidzi , 2020)</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan publik memerlukan koordinasi antar stakeholder yang membentuk, memutuskan, hingga melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan juga memerlukan beberapa pendekatan agar berjalan optimal dan terselesaikan sesuai tujuan dan sasaran.</p>
<p>Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. SALAM : Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i. Vol. 3, No.2</p>	<p>(Yunus & Rezki , 2020).</p>	<p>Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah perlu mengambil langkah sebagai slaah satu upaya penekanan wabah COVID-19. Adapun kebijakan yang di ambil pemerintah dalam menekan peningkatan penyebaran wabah COVID-19, maka</p>

		<p>terdapat kebijakan berupa Lockdown guna mengantisipasi masyarakat untuk bertemu secara kerumunan di masa pandemi ini. Dari sini dapat dilihat bahwasannya kebijakan di ambil berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat sebab di dalam kebijakan juga terdapat langkah yang harus di ambil pemerintah dalam meredakan isu publik.</p>
<p>Peran Pemerintah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Alternatif Kebijakan Pajak untuk UMKM di Bidang Pariwisata Pasca Bencana. Jurnal Media Bina Ilmiah, Vol.14, No.3.</p>	<p>(Mulanahardi & Agusti, 2019)</p>	<p>Partisipasi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dapat di laksanakan melalui pengadaan retribusi pajak terhadap umkm pariwisata. Dalam hal ini pemerintah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas di lapangan, sosialisasi retribusi, pendataan pajak, dan koordinasi antar pihak guna mendukung pelaksanaan pemungutan pajak.</p>
<p>Peran dan Fungsi Pemerintahan Good Governance dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>(Kurniawan, 2020)</p>	<p>Pada penelitian ini, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah perlu</p>

<p>di Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Vol. 3, No.2</p>		<p>melaksanakan partisipasinya dalam menerapkan pengelolaan administrasi sehingga mampu menimbulkan dampak yang baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan yang di butuhkan suatu daerah.</p>
<p>Industri Kopi Lombok di Desa Sigerongan Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram, Vol. 6, No.3.</p>	<p>(Handajani , Akram , Furkam , & Rifai, 2019)</p>	<p>Manajemen dalam pengembangan usaha mampu menekan dampak yang di latar belakang oleh biaya operasional yang tinggi, perputaran modal yang sulit, serta lambatnya potensi produksi yang mampu menyebabkan pendapatan di pasar berkurang. Pengelolaan usaha tersebut dapat di minimalisir dengan pemanfaatan teknologi digital berbasis platform untuk membantu penjual untuk memasarkan daganagannya kepada masyarakat. Hal ini juga dapat di laksanakan bagi <i>home industry</i> karena tidak mengharuskan mereka untuk mendirikan atau menyewa toko secara fisik.</p>
<p>Covid-19, New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. The</p>	<p>(Muhyidin, 2020)</p>	<p>Adanya COVID-19 cukup meimbulkan kerugian negara dalam pelaksanaan</p>

<p>Indonesian Journal of Development Planning. Vol. 4, No.2</p>		<p>pembangunan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti menjelaskan terdapat 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna melaksanakan pembangunan negara di era New Normal, yakni : perencanaan semula, revisi moderat pada pembangunan, dan pergantian rencana untuk ke tahap pemulihan perekonomian yang perlu diperbarui sebab kondisi negara yang sangat jatuh pada tahun ini.</p>
<p>Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2)</p>	<p>(Putri, 2020)</p>	<p>Selain kebijakan, keikutsertaan masyarakat dan kesadaran yang mereka miliki ternyata juga mempengaruhi pengendalian dan pencegahan penularan wabah COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan langkah yang tepat dari pemerintah untuk membentuk kesadaran masyarakat.</p>
<p>Menggerakkan Perekonomian Melalui Pemulihan Usaha dan Industri Mikro Kecil Menengah Pasca Bencana Gempa Bumi di Nusa Tenggara Barat.</p>	<p>(Maryanti , Netrawati , & Faezal , 2019)</p>	<p>Pasca bencana alam memang tidak dapat dipungkiri jika perekonomian meredup, terutama bidang pariwisata. Maka sebab itu, meredupnya</p>

<p>Open Journal System, Vol.14,No.4.</p>		<p>perekonomian pun perlu di bangkitkan secara bertahap dengan adanya industry mikro kecilmenengah yang dpaat di laksanakan oleh masyarakat guna membantu keadaan perekonomian sehari-hari. Meskipun tidak langsung mengalami pelonjakkan, akan tetapi hal tersebut dapat membantu pemulihan secara perlahan.</p>
<p>Kebijakan Pemerintah Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik Dalam Rekonstruksi Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.7, No.2.</p>	<p>(Suliswati & Razi , 2020)</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan jika rekonstruksi ekonomi dapat di laksanakan melalui pengembalian kegiatan masyarakat secara normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Hal ini disebabkan apabila masyarakat tidak melakukan kegiatan seperti biasa dalam pemenuhan kebutuhan hidup maka tidak menutup kemungkinan jika perekonomian mereka akan meredup. Maka dari itu, kegiatan seperti biasa perlu di laksanakan dengan protokol kesehatan agar tetap terhindar dari penyebaran virus COVID-19 apabila</p>

		melaksanakan kegiatan di luar rumah atau tempat umum.
--	--	---

Berdasarkan kajian pustaka yang telah peneliti cantumkan pada penelitian ini maka dapat diketahui jika penelitian sebelumnya berfokus pada penanganan dampak COVID-19 di beberapa daerah khususnya untuk kondisi ekonomi masyarakat, adapun perbedaan dengan penelitian ini ialah adanya fokus penanganan dampak COVID-19 dibidang ekonomi mikro yang ada dilingkungan masyarakat dengan memanfaatkan kekayaan daerah di Kabupaten Ciamis, sebab seperti yang diketahui jika Kabupaten Ciamis memiliki kekayaan sumber daya alam khususnya dibidang pertanian serta terdapat inovasi Pemerintah Daerah dalam mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat dengan kerjasama bersama instansi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasa Pandemi COVID-19 ini.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Pada dasarnya konsep kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil sebagai alternatif pemerintah terhadap lingkungan yang di kelola dalam menghadapi, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan di dalam suatu negara atau daerah layaknya solusi dari permasalahan tersebut (Kambey, 2017). Kebijakan dapat di substansikan sebagai keputusan dari beberapa pilihan guna mewujudkan pencapaian tujuan yang dilatar belakangi oleh isu publik sehingga memerlukan keputusan agar mendapatkan penghasilan solusi (Tachjan, 2008). Menurut Iskandar (2012), pembentukan kebijakan publik terdapat rangkaian berupa rencana program, pelaksanaan pogram melalui aksi serta

aktivitas yang di timbulkan, keputusan, serta sikap pembentuk saat menyelenggarakan kebijakan.

Pada kondisi tertentu, terdapat beberapa elemen penting dalam kebijakan , seperti halnya penetapan pada tindakan penyelenggara kebijakan publik, bentuk nyata atau hasil yang di cetak dari kebijakan publik tersebut, kebijakan publik selalu di landasi oleh maksud dan tujuan tertentu, dan adanya kepentingan yang menyeluruh dari keberadaan kebijakan publik. Konteks kebijakan yang di laksanakan pemerintah ini menjelaskan adanya hakekat berupa aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menciptakan keberlangsungan hidup masyarakat sesuai dengan cita-cita bersama (Islamy, 1994). Hal ini di setuju pula oleh Winarno (2002) jika klasifikasi kebijakan publik terbagi dalam dua kategori, yaitu sebagai tindakan pemerintah di sebuah kebijakan dan proses penyelesaian masalah dengan melakukan perumusan, pelaksanaan, dan penilaian.

Kebijakan publik ternyata juga mampu menimbulkan suatu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan pada suatu program agar terlaksana secara efektif dan efisien ((Sjafrizal, 2009) dalam Indahsari, 2016)). Menurut Chandler (1962), strategi pemerintah dapat ditimbulkan dari kebijakan yang dibentuk berdasarkan prioritas pada alokasi dana beserta sumber daya sehingga mempermudah pelaksanaan program. Keberadaan strategi dalam pelaksanaan program pemerintahan diciptakan untuk pencapaian persaingan melalui tindakan khusus agar terjadi peningkatan pada penyelenggara program dan penerima program (Hamel & Prahalad, 1995). Hal ini dikarenakan seluruh arah serta orientasi dari organisasi mempengaruhi mekanisme yang di rencanakan pihak pengelola program berdasarkan perspektif kondisi di masa yang akan datang (Allison, 2013).

Pengimplementasian strategi ialah tahap penting yang sudah seharusnya di rumuskan secara jelas dan tepat agar tidak menyebabkan kesalahan organisasi saat merealisasikan kebijakan publik (Mahmudi, 2010). Kebijakan memberikan dampak atau yang lebih sering dikenal dengan *Regulatory Impact Analysis (RIA)* adalah kegiatan untuk mengkaji dampak suatu kebijakan sebelum diberlakukan secara legal (KLC Kemenkeu, 2019). Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan publik ialah (Nurhidayati, 2020): 1) Kesesuaian antara tujuan dan sasaran dari kebijakan yang dibentuk dalam program atau kegiatan. 2) Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 3) Adanya strategi yang tersusun bagi pelaksana program atau kegiatan oleh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain digunakan sebagai pembentuk suatu solusi, ternyata kebijakan publik yang dibentuk dan dilaksanakan pemerintah juga memiliki peran lain bagi pemerintah, yakni menjadi salah satu pilihan bagi mereka untuk mengambil atau bahkan tidak mengambil keputusan pada suatu kondisi. Tindakan itu pula yang mencerminkan sifat dan sikap pemerintah di mata masyarakat mengenai langkah keputusan yang diperoleh, apalagi yang bersangkutan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu kebijakan publik memiliki beberapa sifat, antara lain regulative, ekstraktif, organisasional, dan distributif (Dye, 2005). Disisi lain, Agustino (2008) menjelaskan perihal karakteristik utama dari kebijakan publik yang mengandung unsur kegiatan dari segala keputusan yang terpisah mengenai kesungguhan pemerintah dalam melakukan sesuatu baik bersifat positif atau pun negatif. Positif dan negatifnya kebijakan publik dapat dilihat dari perbandingan antara pengambilan keputusan dengan tindakan, dikatakan positif apabila pemerintah mampu memutuskan kebijakan beserta tindakan yang relevan.

Menurut Harold Laswell, terdapat beberapa tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai indikator dari kebijakan, adapun indikator tersebut ialah (Syafiie, 1992):

1. Keputusan yang jelas
2. Kecenderungan atas isu atau permasalahan yang menjadi pusat perhatian pemerintah sehingga memerlukan kebijakan publik.
3. Kondisi dari lingkungan masyarakat saat isu publik tersebut muncul
4. Proyeksi keadaan kedepannya setelah adanya kebijakan publik tersebut muncul.
5. Hasil yang di berikan dari berlangsungnya kebijakan publik tersebut

Sementara menurut Howlet & Ramesh (1995), tahapan pada pembentukan kebijakan oleh pemerintah juga dapat dijadikan standar kesesuaian yang terdiri dari :

1. Penyusunan agenda

Pada poin ini, pemerintah diminta agar mampu memusatkan perhatian masyarakat terhadap suatu kebijakan atas keberadaan isu publik sehingga membantu langkah awal pemerintah dalam membentuk dan melaksanakan kebijakan publik kedepannya.

2. Formulasi terhadap kebijakan

Pada tahap ini, tidak semua hal mengenai isu publik dijadikan sebagai kebijakan pemerintah. Pasalnya, pemerintah perlu memilah hal-hal apa saja yang pantas untuk di rumuskan kedalam kebijakan publik.

3. Pembentukan kebijakan

Pembentukan kebijakan juga merupakan proses pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembentuk dan penyelenggara kebijakan. Pada tahap ini standar pemerintah dalam melakukan pengambilan keputusan sangatlah di perhatikan oleh

masyarakat sehingga menimbulkan penafsiran kesesuaian atau tidak terhadap kondisi masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan ialah pelaksanaan kebijakan yang telah dibentuk sesuai dengan standar dan kebutuhan agar mencapai hasil yang kemudian di kelola pada evaluasi kebijakan.

5. Evaluasi kebijakan

Pada tahapan akhir ini hasil dari pengimplementasian kebijakan akan dievaluasi dan dilakukan penilaian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan pengadaan dari kebijakan publik.

Kebijakan publik juga mampu mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Adapun peran kebijakan publik pada aspek sosial dan ekonomi ialah sebagai berikut :

a. Kebijakan Publik untuk Aspek Sosial

Pada hakekatnya kebijakan publik dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Pasalnya kebijakan berfungsi sebagai pengatur sekaligus wadah untuk menyalurkan segala interaksi terkait kesatuan sosial yang di dasarkan terhadap perbedaan suku, bangsa, adat, agama, dan kedaerahan lainnya. Kebijakan publik dapat pula di maknai sebagai suatu proses yang berinteraksi negara beserta rakyatnya. (Parsons, 1997). Kebijakan publik merupakan lingkup bersama yang menggambarkan lingkup publik ialah lingkup bersama terkait masalah dan kebutuhan sosial. Dalam suatu kebijakan publik juga terdapat strategi dan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan

kesejahteraan sosial melalui perlindungan dan jaminan yang mencakup bantuan, jaminan, bahkan pengamanan sosial.(Suryono, 2014).

b. Kebijakan Publik untuk Aspek Ekonomi

Pada aspek ekonomi, kebijakan ialah suatu paket yang dapat berinteraksi dengan segala tatanan pasar ekonomi sehingga mampu bersistem secara dinamis apabila di kelola dengan benar. Kebijakan publik memiliki peran utama agar dapat berkembang dengan ekonomi pasar melalui ekosistem pasar dengan cara memberi insentif atau regulasi yang ketat. Dalam kebijakan publik terdapat sebagian intensitas bagi masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan apabila aspek ekonomi juga terdapat gap dan realitas yang jauh dari ekspektasi yang di harapkan seperti halnya *unintended consequence*. Jika tidak cermat dan tidak menyadari dari awal maka dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat (Negara, 2017).

Namun, dikatakan sebagai sisi negatif jika keputusan tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya, yakni (Solichin, 2008) :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusannya
2. Tidak semua kebijakan dibedakan dari administrasinya
3. Kebijakan mencakup harapan dan perilaku
4. Kebijakan memiliki hasil akhir yang ingin dicapai
5. Kebijakan memiliki tujuan tertentu yang tertera secara eksplisit maupun implisit
6. Kebijakan diruluskan secara subjektif

1.6.2 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Dalam (Nuhhirto, 2020) dijelaskan bahwasannya perkembangan pada kegiatan produksi barang dan jasa oleh masyarakat mampu meningkatkan perekonomian daerah sebab melalui kegiatan yang dibentuk dan dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan daerah mampu mengakibatkan penambahan bagi kemakmuran kehidupan masyarakat daerah setempat. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu kenaikan output total untuk merefleksikan kemampuan dan kapasitas suatu negara untuk penyediaan barang dan jasa bagi penduduknya dalam jangka panjang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar berkaitan dengan produktivitas kerja dan penduduk di daerah. Pertumbuhan pada ekonomi suatu daerah merupakan wujud dari keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli daerah sebab peningkatan atas pertumbuhan ekonomi terjadi dari waktu ke waktu. Apabila terjadi penurunan pada pengadaan barang dan jasa pada suatu daerah, maka tidak menutup kemungkinan jika perekonomian daerah tersebut juga dapat menurun (Amri, 2020).

Adapun tolak ukur dari pertumbuhan ekonomi disuatu daerah ialah dengan adanya peningkatan pada kas daerah melalui PDRB per kapita serta PAD (pendapatan asli daerah) guna menunjang pelaksanaan dan keberhasilan program kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini disampaikan pula oleh (Tumangkeng, 2018) jika pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari adanya peran Pemerintah Daerah serta masyarakat dan swasta dalam peningkatan PDRB dan PAD dengan mengelola sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat mengingat tujuan dari perekonomian daerah ialah mengembangkan lapangan kerja masyarakat, mencapai standar perekonomian daerah, dan mengembangkan basis ekonomi pada bidang tertentu.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, strategi pengembangan ekonomi daerah yang efektif dan efisien sangatlah diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan adanya kebijakan perekonomian bagi perkembangan kondisi daerah untuk mencapai suatu keberhasilan. Berikut ialah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pada daerah : 1) Pengembangan usaha. 3) Pengembangan SDM. 4) Pengembangan pada kegiatan pembangunan dan pemembrdayaan wilayah yang berpotensi untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi (Tumangkeng, 2018).

Kegiatan perekonomian membutuhkan berbagai kekuatan internal untuk mendorong suatu daerah agar mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi diwilayah pada jangka pendek bahkan jangka panjang kedepannya. Kekuatan tersebut dapat diciptakan dalam beberapa sektor atau bidang yang memiliki peran dalam peningkatan perekonomian untuk mencapai kondisi kapita perekonomian masyarakat dan daerah yang stabil (Talaohu, Matitaputty, & Sangadji , 2019). Menurut teori perekonomian Adam Smith dalam penelitian Rajab & Rusli (2019), perekonomian timbul dari adanya produktivitas masyarakat disuatu daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berkenaan dengan ketahanan hidup yang dilandaskan oleh beberapa faktor pendukung untuk mencapai ketahanan hidup pada konteks perekonomian, yakni : 1) Keterampilan kerja. 2) Penggunaan mesin penghemat tenaga. 3) Hubungan antar masyarakat dalam mengelola sumber daya atau produk yang dapat diperjual belikan sehingga terjadi pertumbuhan kegiatan ekonomi dan peningkatan pendapatan bagi penjual serta pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembelian produk. 4) Pemanfaatan teknologi. 5) Spesialisasi sektor.

1.6.3 Pemulihan Ekonomi Sektor Pertanian

Pemulihan perekonomian pada sektor pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian guna menstabilisasi tingkat pendapatan masyarakat disuatu daerah. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, Penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri (Latumaresa, 2015). Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternakan (Puton, 2005).

Menurut Mosher pemulihan ekonomi pada sektor pertanian merupakan suatu bentuk kegiatan produksi hasil tani yang akan dikelola untuk suatu bisnis sehingga menimbulkan pemasukan bagi pihak pengelola pertanian. Hal ini serupa pula pada teori Van Aarsten yang menyatakan jika pertanian memiliki peran penting bagi kehidupan perekonomian masyarakat meskipun hanya terbatas dari tumbuhan yang ditanam, namun hal tersebut mampu mengakibatkan pemenuhan kebutuhan publik (Tambunan, 2006).

Adapun salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah ialah Sektor Pertanian. Sektor tersebut memiliki dominasi pada pendapatan masyarakat berupa potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pengaruh terhadap pendapatan nasional yang cukup besar sehingga mampu mengakibatkan ekspor hasil tani terhadap suatu daerah sehingga memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat dan

daerah yang memproduksi hasil tani. Selain itu, sektor pertanian juga mampu menyediakan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan (Ramly, 2017).

Dalam Yusuf (2020) dijelaskan bahwasannya urgensi perekonomian di Indonesia dapat diatasi dengan pengembangan produksi tani guna meningkatkan perdagangan produk di Indonesia agar melibatkan daerah yang berperan sebagai produsen hasil tani. Perekonomian yang ditimbulkan dari sektor pertanian berupa sistem penyediaan pangan mampu menjangkau pengaman sosial (sosial safety net) alamiah. Sektor pertanian masih merupakan sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Indonesia, apalagi ketika ada krisis ekonomi sebab pertanian memiliki restriksi sosial akibat mobilitas kebutuhan yang terus meningkat. Pengukuran pemulihan ekonomi pada sektor perekonomian dapat dilihat dari pelaksanaan yang diindikasikan melalui beberapa tolak ukur sebagai berikut ((Sabirin, 2000) (Tambunan, 2006)) :

1. Fiskal pada sektor perekonomian : upaya yang dilakukan dalam pemulihan ekonomi pada konsep ini ialah realokasi kegiatan atau program yang tidak terlalu prioritas sehingga mampu memangkas biaya pada pertanian.
2. Pengelolaan usaha pada sektor pertanian : Pengaturan bidang usaha pada sektor pertanian agar lebih terprogram sehingga terlaksana secara efektif dan efisien.
3. Surplus perdagangan dan pembayaran : Masuknya permintaan hasil tani oleh konsumen dan meningkatnya pembayaran, baik lewat ekspor atau penyaluran hasil-hasil pertanian terhadap wilayah lain atau peningkatan produksi komoditi-komoditi pertanian menggantikan penyaluran hasil produksi dari daerah lain.

Sebagai sektor yang diandalkan dalam pemenuhan pangan, sektor pertanian ternyata juga mampu berkontribusi pada perekonomian yang memberikan dampak sebagai berikut (Fortunika, Istiyanti, & Sriyadi, 2017) :

1. Permintaan : struktur permintaan akibat sektor pertanian dapat dikatakan meningkat apabila produksi tani mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Industri : struktur industri juga mengalami peningkatan dari adanya hasil tani yang di produksi, hal ini diakibatkan dari adanya bidang industri yang mengelola hasil tani menjadi suatu usaha dan menghasilkan produk konsumsi bagi masyarakat.
3. Investasi : Meningkatnya kegiatan pertanian dapat dijadikan sebagai suatu penanaman modal berupa pemasukan uang dan penyediaan barang.
4. Peningkatan nilai tambah bruto (NTB) : peningkatan nilai tambah bruto ialah suatu peningkatan atau pertambahan pada upah atau gaji bagi masyarakat serta penambahan keuntungan bagi pihak yang melaksanakan kegiatan usaha.

1.7 Definisi Konseptual

1. Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang di ambil pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik sehingga terbentuk solusi dan upaya yang harus di laksanakan dalam menghadapi kondisi yang ada.
2. Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan suatu kenaikan output total untuk merefleksikan kemampuan dan kapasitas suatu negara untuk penyediaan barang dan jasa bagi penduduknya dalam jangka panjang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi agar berkaitan dengan produktivitas kerja dan penduduk di daerah.

3. Pemulihan Ekonomi Pada Sektor Pertanian ialah upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian guna menstabilisasi tingkat pendapatan masyarakat disuatu daerah.

1.8 Definisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pertanian (Sabirin, 2000), (Tambunan, 2006) (Fortunika, Istiyanti , & Sriyadi , 2017))	Keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang jelas terhadap pemulihan ekonomi pertanian yang mencakup : a. Fiskal b. Pengelolaan usaha c. Surplus perdagangan dan pembayaran	a. Fiskal : realokasi kegiatan atau program pertanian b. Pengelolaan usaha : pengaturan bidang usaha melalui program yang dibentuk c. Surplus perdagangan dan pembayaran : peningkatan permintaan, produksi, dan pembelian.
	a. Permintaan	Pemenuhan kebutuhan masyarakat

Pengaruh kebijakan pemulihan ekonomi pertanian	b. Industri	Peningkatan usaha dari hasil produksi tani
	c. Investasi	a. Penanaman modal b. Pemasukan uang c. Ketersediaan barang
	d. Kondisi Nilai Tambah Bruto	a. Penambahan keuntungan pada lapangan usaha b. Peningkatan upah dan gaji

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan sifat dari fenomena serta gejala yang membahas tentang perkembangan hubungan objek penelitian dengan aspek sosial di masyarakat (Surachmad, 1982). Metode ini memiliki karakteristik yang membutuhkan konsentrasi pada penyusunan masalah di penulisan dengan menyertakan pengumpulan data yang diatur, dijelaskan, dan dianalisis secara intensif dan terperinci (Nurmandi & Purnomo, 2011). Manfaat analisis kualitatif bertujuan agar dapat memahami, memaknai, dan mendefinisikan hubungan perbandingan antar gejala sosial yang saling berhubungan (Martono, 2011).

1.9.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Ciamis sebagai lokasi penelitian sebab wilayah ini memiliki program pemulihan ekonomi dimasa pandemi Covid-19 ini, yakni dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi daerah. Adapun tempat yang di tuju sebagai bahan penelitian penulis ialah Kantor bupati Kabupaten Ciamis berada di Jl. Jenderal Sudirman No.16, **Ciamis**, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

1.9.3 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang di dapatkan peneliti berasal dari kegiatan wawancara dan kunjungan langsung terhadap Pemerintah Kabupaten Ciamis, Instansi Pemerintah, dan Survei terhadap masyarakat yang mengalami kemunduran perekonomian dan berusaha dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi dimasa Pandemi COVID-19 ini. Pelaksanaan wawancara dan survey tersebut bertujuan agar peneliti mendapatkan data akurat dan kejelasan mengenai kebijakan pemulihan ekonomi untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu seperti jurnal dan prosiding seminar nasional sebagai bantuan acuan data dalam penulisan ini. Selain melalui penelitian terdahulu, penulis juga menggunakan sumber berita online dan website resmi pemerintahan untuk mendapatkan data yang spesifik mengenai kebijakan pemulihan ekonomi untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra, 2018). Adapun pihak atau instansi yang di wawancarai dalam penelitian ini ialah :

- 1) Bupati Kabupaten Ciamis.
- 2) Ketua Dinas Sosial Kabupaten Ciamis
- 3) Ketua/Staff Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis.
- 4) Masyarakat yang terkena penurunan ekonomi akibat dampak dari COVID-19 (Kelompok Tani).
- 5) Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis
- 6) LSM Dinamika Masyarakat Ciamis

Tabel Pertanyaan

No	Daftar Pertanyaan	Informan
1.	Bagaimana kebijakan pemulihan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan dampak COVID-19 di Kabupaten Ciamis ?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.

	Apakah ada langkah yang diberikan dinas-dinas yang terkait?	
2.	Apakah sektor pertanian memberikan dampak yang signifikan terhadap pemulihan ekonomi di Kabuapten Ciamis ?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
3.	Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan produksi hasil tani di Kabuapten Ciamis dalam pemulihan dampak COVID-19 di Kabupaten Ciamis ?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
4.	Bagaimana kebijakan fiskal (relokasi program atau kegiatan) pada sektor pertanian yang dilaksnaakn pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi disektor pertanian?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.

d.	Pengelolaan usaha apa saja yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Ciamis pada sektor pertanian guna meringankan dampak Pandemi ini?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
e.	Bagaimana kondisi surplus perkeonomian di Kabupaten Ciamis yang disebabkan oleh sektor pertanian?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
f.	Bagaimana dampak kebijakan pemulihan ekonomi yang diselenggarakan oleh Kabupaten Ciamis bersama masyarakat pada sektor pertanian?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
g.	Apakah terdapat peningkatan hasil produksi pertanian dimasa Pandemi COVID-19 ini?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.

h.	Berapa keuntungan yang didapatkan oleh kabuapten Ciamis dan masyarakat dengan adanya investasi pada sektor pertanian?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
i.	Bagaimaa kondisi Nilai Tambah bruto denan adanya pelaksanaan kegiatan usaha dibidang pertanian bagi masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini ?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
j.	Siapa saja yang berpartisipasi pada pelaksnaan kebijakan pemulihan ekonomi pada sektor pertanian ini ? Apakah sudah terlaksana secara efektif ?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis.
k.	Dengan adanya beberapa kegiatan usaha pada sektor pertanian, apakah mempengaruhi penurunan pengangguran di Kabupaten Ciamis ?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis,

		Masyarakat Kabupaten Ciamis
l.	Inovasi apa yang diberikan terhadap masyarakat pertanian untuk meningkatkan kemampuannya dalam pengelolaan usaha tani ?	Bupati Kabupaten Ciamis, Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis, masyarakat
m.	Bgaimana peran LSM dalam membantu masyarakat untuk melaksnakan kegiatan usaha tani guna memulihkan ekonomi masa pandemi COVID-19 ini?	Masyarakat tani, masyarakat umum, LSM

b. Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai catatan tertulis yang di terima peneliti dari narasumber terkait suatu hal yang telah terjadi baik fakta dan data sebagai bahan dokumentasi yang dapat dilampirkan dalam penelitian. Studi dengan melakukan penyelidikan data, dokumen penting, jurnal, berita, dan file terangkum dalam rangkaian dokumentasi ini.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Menurut Hadi (1986), teknik analisa data yang di gunakan pada penelitian kualitatif dapat di lakukan melalui wawancara, survey, dan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya guna mendapatkan data-ata terdahulu agar mempermudah peneliti dalam membandingkan dan menganalisis data yang ada menjadi suatu pembahasan yang menarik. Akan tetapi pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam pencarian data sehingga mempermudah dalam mendapatkan data yang kemudian di kaji secara rinci ke dalam pembahasan guna mendapatkan kajian yang menarik. Adapun metode yang dapat di gunakan dalam analisis data ialah metode induktif yang merupakan suatu pengambilan kesimpulan melalui data khusus yang di landaskan fakta konkret untuk menarik generalisasi yang bersifat umum.

Mengenai penelitian yang di dapatkan melalui beberapa sumber, maka penulis akan menganalisis tema tersebut dengan logika yang relevan serta di imbangi fakta yang akurat agar mempermudah dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, sehingga melahirkan penelitian yang tidak sama seperti penelitian sebelumnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam menulis penelitian ini ialah menggunakan teknik triangulasi data agar mendapatkan data secara akurat guna mempermudah pengkajian permasalahan berupa :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyaringan data-data kasar yang di temukan oleh peneliti baik di lapangan ataupun melalui penelitian sbelumnya agar memudahkan penulis dalam melakukan ringkasan dan pelaksanaan analisis sehingga penulis mendapatkan data akurat yang pantas untuk di tampilkan dalam penelitian ini. Bentuk analisis mampu menajamkan , menggolongkan, memilah sedemikian rupa untuk mendapatkan penarikan hasil yang dapat diverifikasi. Data kualitatif yang di hasilkan dari reduksi ini akan lebih mudah untuk disederhanakan dan transformasikan melalui berbagai macam cara, yaitu : seleksi, penggolongan, ringkasan agar mendapatkan hasil yang singkat dengan satu pola yang luas.

b. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan data dan menyeleksi data yang di dapatkan, maka penulis melakukan penyajian data sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tidak menampilkan kelebihan data yang mampu menimbulkan kerumitan analisa atau bahkan kekurangan data yang menyebabkan kurang relevan dan akuratnya penelitian tersebut sebab minimnya fakta di lapangan.

c. Matriks kesimpulan

Matrik kesimpulan merupakan penarikan benang merah yang penulis dapatkan dari perolehan data. Pada tahap ini penulis dapat membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang dapat menunjang permasalahan dalam penelitian ini mengingat terdapat beberapa rumusan masalah yang harus di selesaikan melalui pencarian jalan keluar dari hal-hal yang di jadikan perhatian dalam penelitian ini.